



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI APRIDA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 735205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.765.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.410 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 180 m² di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 1.000 m² di KAB / KOTA KOTA SUNGAI PENUH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 189.900.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
23.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.059.900.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.059.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.